

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi yang mana dalam penerapannya menghendaki kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Bangsa Indonesia ini. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil melalui sebuah pemilihan umum. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi.<sup>1</sup>

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, sudah menjadi kontroversi sejak Yunani kuno, secara istilah demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi rakyat berdaulat dan rakyat berkuasa.<sup>2</sup> Negara Indonesia mendukung kedaulatan rakyat (demokrasi), pemilik kekuasaan tertinggi sebenarnya adalah rakyat, jadi kekuasaan adalah milik rakyat karena berasal dari rakyat, milik rakyat, dan untuk rakyat. Melalui sistem ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibimbing dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketatanegaraan (demokrasi konstitusional) yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi. Jika sistem politik yang ada menggunakan konsep demokrasi, maka dapat dikatakan negara tersebut merupakan negara demokrasi.<sup>3</sup>

Indonesia setelah memasuki era reformasi mempercayai bahwa demokrasi adalah konsep yang paling relevan untuk menerapkan sistem politiknya.

---

<sup>1</sup> Thomas Power dan Eve Warbuton. “*Demokrasi di Indonesia*”. ( Jakarta: Gramedia.2019), 195.

<sup>2</sup> Mirriam Budrjo.” *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.”( Jakarta: Gramedia Pustaka.2008), 105.

<sup>3</sup>Zulkifri Sulaeman, *Demokrasi Untuk Indonesiaz: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Kompas, 2010), 12.

Demokrasi merupakan konsep yang positif, karena, demokrasi dapat membawa keadilan bagi semua orang. orang dapat mengekspresikan keinginan mereka secara bebas di sini. Demokrasi dicirikan oleh adanya tiga syarat, yaitu kemampuan melawan dan mempertahankan hak, keikutsertaan masyarakat, dan perlindungan hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem demokrasi memerlukan sistem pemilu yang merupakan perangkat kelembagaan utama untuk memenuhi ketiga syarat tersebut. Dalam hal ini, sistem demokrasi memerlukan sistem pemilu yang merupakan perangkat kelembagaan utama untuk memenuhi ketiga syarat tersebut. Melalui sistem ini Anda dapat melihat persaingan, partisipasi, dan perlindungan hak politik.<sup>4</sup>

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan di tangan rakyat memiliki arti bahwa, rakyat yang di memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan mengatur jalanya pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh masyarakat, serta memilih wakil rakyat yang untuk mengawasi jalanya pemerintahan.<sup>5</sup> Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam hal ini dilaksanakan melalui Pemilu yang secara langsung dilaksanakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Bentuk keikutsertaan rakyat secara langsung dalam Pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan Pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 serta merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan wakil rakyat dan

---

<sup>4</sup> Thomas Power dan Eve Warbuton. " *Demokrasi di Indonesia* ". ( Jakarta: Gramedia.2019), 267.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (UU 7/2017).

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan UUD 1945 berlandaskan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>6</sup>

Partisipasi politik di dalam Negara demokrasi adalah sebuah keharusan.<sup>7</sup> Seperti halnya Negara Indonesia, Karena negara demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintah yang seluruh bagian dari cabang kekuasaan di dalamnya mempresentasikan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat, sehingga pengisian setiap cabang kekuasaan yang ada di dalamnya harus membuka ruang agar Masyarakat ikut terlibat menentukan.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Bekasi tentunya regulasi memberikan ruang yang sangat luas agar masyarakat ikut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ketentuan di dalam pasal 44b ayat 1 UU No 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat. Dalam bentuk sosialisasi politik dan Pendidikan politik yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu.

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat Kota Bekasi. Pentingnya masyarakat di kota ini memiliki perwakilannya demi tercapainya Pembangunan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi Kota Bekasi. Pemilu merupakan program tahunan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, berhasil tidaknya penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilihat dari rangkaian prosesnya seperti, pendataan penduduk, pendaftaran calon, penetapan calon tetap, pemilihan, dan penetapan wakil masyarakat yang ada di dalam partai-partai tertentu. Akan tetapi keberhasilan Pemilu akan terlihat dari berapa besar minat masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya untuk memilih wakil yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi mereka nantinya. Disinilah peran KPU untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dengan adanya sosialisasi dan memberikan himbuan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat akan merasa antusias

---

<sup>6</sup> Hartuti Purnaweni. "Demokrasi Indonesia dari Masa Kemasa", (*Jurnal, Administrasi Publik* 2020), 55.

<sup>7</sup> Liando, D. M. "Pemilu dan Partisipasi Masyarakat", (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3:2 (Maret 2017): 14– 28.

<sup>8</sup> Budiarto, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (PT. Gramedia Pustaka Utama.2015), 165.

untuk ikut memilih apabila diberikan pemahaman mengenai arti penting Pemilu bagi penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi akan sebaliknya apabila beranggapan bahwa Pemilu hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu saja.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan ketimpangan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Bekasi, yang tetap berlanjut meskipun telah diterapkan sistem Pemilu serentak. Tujuan dalam penelitian ini adalah seperti apakah Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dan identifikasi faktor-faktor yang pendukung dan penghambat strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengetahui peran KPU kota Bekasi ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah*.

*Fiqh Siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>9</sup>

Pada Pilpres 2019 Kota Bekasi terdapat 76,1% partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Bekasi, berbeda dengan Pilpres sebelumnya pada tahun 2014 yang memiliki 60,9% peserta partisipan Pemilu di Kota Bekasi.<sup>10</sup> Peningkatan kualitas Pemilu ini diperlukan karena wilayah Bekasi pada masa Pemilu 2019 masih diselimuti oleh isu-isu politik yang negatif seperti disinformasi kotak suara yang tidak terkunci hingga Bekasi menjadi salah satu wilayah rawan konflik berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Bawaslu.

---

<sup>9</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

<sup>10</sup> Gana Buana. "Prabowo-Sandi di 11 dari 12 Kecamatan Kota Bekasi". <https://mediaindonesia.com/megapolitan/234982/prabowo-sandi-menang-di-11-dari-12-kecamatan-kota-bekasi>, (Diakses tanggal 12 Desember 2023)



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan pemantauan pada wilayah Sumatra Utara, Jakarta, Bekasi, Bandung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan terkait hasil Pemilu yang jauh dari intervensi dan isu rasial.<sup>11</sup>

Melihat kondisi sebelumnya terhadap keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi untuk memberikan suaranya memang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah partisipasi dalam pesta demokrasi rendah atau tinggi. Berdasarkan data yang ada ini keterlibatan Masyarakat dalam keikutsertaannya untuk memilih sangat berfluktuasi antara Pemilu untuk legislatif, Gubernur dan Presiden. Dengan demikian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa penulis tertarik untuk meneliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana strategi KPU di Kota Bekasi pada tahun 2024. Sehingga berangkat dari latar belakang masalah tersebut penelitian ini mengambil judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Di Kota Bekasi Dalam Pemilu Serentak 2024”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat diberikan kesimpulan identifikasi masalahnya adalah mengetahui peranan komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan serentak tahun 2024.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas dan mencapai fokus yang di harapkan maka penulis memberikan batasa-batasan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bahwa data yang diambil dalam penelitian adalah **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”**.

### **3. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Fira Nursyabani, "Bekasi Jadi Salah Satu Daerah Rawan Konflik Pemilu." <https://bekasi.ayoindonesia.com/berita-bekasi/pr-30858558/Bekasi-Jadi-Salah-Satu-Daerah-Rawan-Konflik-Pemilu>, (Diakses Tanggal 12 Desember 2023)

1. Bagaimana Strategi KPU Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat KPU kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ?
3. Bagaimana peran KPU kota Bekasi ditinjau dari perspektif fiqh *siyāsah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi KPU Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghalang KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi politik.
3. Untuk mengetahui strategi KPU Kota Bekasi ditinjau dari perspektif fiqh *siyāsah*.

Kegunaan penelitian yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Acuan untuk penelitian lebih lanjut serta untuk menambah pengetahuan tentang strategi KPU Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti: Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Penelitian ini juga digunakan untuk menambah pengetahuan serta informasi peneliti tentang peran KPU Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024
  - b. Bagi Akademik: Pemikiran serta ide-ide maupun hasil pada penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya, dan juga dapat menjadi sumber penelitian tambahan dan referensi tambahan untuk peran KPU Kota Bekasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024.

- c. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan wawasan baru terkait peran KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak 2024.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam menunjang penelitian dengan judul “Strategi KPU Kota Bekasi dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak 2024”. penelitian telah mengulas serta mengkaji dari beberapa penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya dilakukan oleh:

*Pertama*, Buku yang ditulis oleh Mohammad Najib (cd) berjudul “Pemilihan Kepala Daerah dan Pengembangan Demokrasi Lokal”. Membahas mengenai problem yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berisikan ulasan dari setiap penulis mulai dari problem persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang menyangkut tentang kendala KPU dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada saat pelaksanaan problema yang terjadi di antaranya menyangkut tentang penundaan pemilihan kepala daerah dan Teknik pemungutan serta perhitungan suara.<sup>12</sup> Penelitian ini melihat bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh pelaksana atau penyelenggara Pemilihan kepala daerah terutama kendala yang di alami oleh KPU.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Anriani Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Takalar sudah baik. Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak di Kabupaten Takalar pada tanggal 17 April 2019 sangat meningkat. Hal ini didukung oleh

---

<sup>12</sup> Mohmmad Najib (cd), “*Pemilihan Kepala Daerah dan Pengembangan Demokrasi Lokal*” (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum DIY, 2006), 50.

hasil perhitungan suara menunjukkan sebanyak 89% masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pemilu serentak.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang di tulis oleh Maria Desti Rita mahasiswa Universitas Lampung (2016) yang berjudul “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung”. Tujuan penelitian peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, untuk mendeskripsikan peranan KPU dalam pemberian informasi, penyediaan aksesibilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas sesuai PKPU No 5 Tahun 2015.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena KPU kesulitan menjangkau keberadaan mereka. Pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok penyandang disabilitas, dengan harapan mereka dapat menjadi agen-agen penyampai sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak terjangkau oleh KPU.<sup>14</sup>

*Keempat*, Skripsi yang di tulis oleh Annisa Putri (2019) Mahasiswa Universitas Lampung dengan Judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bndar Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemilu Pada Pilpres 2019”. Masalah yang di angkat adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hasil dari penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum melakukan program-program kegiatan yang dimana itu adalah usahanya untuk mengajak pemilih pemula agar berpartisipasi dalam Pemilu, dan terbukti ada peningkatan partisipasi pemilih

---

<sup>13</sup> Ariani.”Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Takalar”.(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar). 5.

<sup>14</sup> Maria Desti Rita “Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung”(Skripsi, Universitas Lampung 2016), 2.



pemula, strategi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>15</sup>

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Megawati dan Andi Tenri Padang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020) yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula”.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui:

- 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ke tingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada;
- 2) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (*face to face*), *Training Of Trainer*, dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula di antaranya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Liona Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial”. Hasil

---

<sup>15</sup>Annisa Putri “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019”(Skripsi, Universitas Lampung 2019), 50.

<sup>16</sup>Megawati dan Andi Tenri Padang, “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula,”(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar) 5:2 (Maret 2020), 30-45.

penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan media sosial di kalangan pemilih pemula semakin meningkat. Selain itu, para pemilih pemula memilih memilih untuk melakukan intraksi sosial (Jejaring Sosial) dengan menggunakan media sosial serta pengguna media sosial dalam jaringan sosialnya tidak digunakan untuk menciptakan jaringan baru dengan intraksi dan kelompok baru melainkan hanya untuk memperkuat jaringan lama dalam dunia nyata. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian kualitatif. Hal ini tentu saja menjadi salah satu persamaan dengan penelitian ini, Selain itu, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan wawancara dan diskusi terarah Bersama partisipan. Orientasi penelitian tersebut terletak pada jaringan sosial atau media sosial pemilih pemula dalam duni politik.<sup>17</sup>

*Ketujuh*, Skripsi yang diteliti oleh Arifin Mahasiswa Universitas Karimun (2020) dalam penelitian yang berjudul “Peran komisi pemilihan umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2014”. Penelitian ini membahas tentang peran komisi pemilihan umum Kabupaten Karimun dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu presiden 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014.<sup>18</sup>

*Kedelapan*, Jurnal yang ditulis oleh Akasri Razak dan Aan Asnawi mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang berjudul “Upaya

---

<sup>17</sup> Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial di Media Sosial” (Fakultas Hukum Universitas Surabaya),4:2 (Juni 2020): 6-30.

<sup>18</sup> Arifin, “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2014,”(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Karimun) 40.

Meningkatkan Pemilu yang Demokratis Melalui Peran Komisi Pemilihan Umum”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas terlaksananya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Tipe penelitiannya yang digunakan adalah tipe empiris yang dilakukan KPU Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fungsi KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis pada tahun 2019 ialah kurang efektif, meskipun tingkat partisipasi hamper mencapai 90% namun pada saat yang bersamaan surat suara yang tidak sah mencapai 3,02% atau berjumlah 3676. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi KPU yaitu faktor eksternal dan internal baik dari cuaca, beberapa lokasi yang sulit dijangkau secara langsung dan tidak langsung atau aksesibilitas, sumberdaya manusia yang berkualitas dari jajaran KPU dan pengetahuan masyarakat terhadap pemilu pada umumnya.<sup>19</sup>

*Kesembilan*, Jurnal yang di tulis oleh Dri Sucipto mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Luwuk (2019) yang berjudul “Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana sumber data diambil dari penelitian lapangan dan study kepustakaan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Laut penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Relawan Demokrasi di Kabupaten Banggai Laut dapat dikatakan berhasil karena tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 di Kabupaten Banggai Laut mencapai sebanyak 84,74 %. Dalam pelaksanaan pemilihan umum salah

---

<sup>19</sup> Askari Razak dan Aan Aswari, “Upaya Meningkatkan Pemilu yang Demokratis Melalui Peran Komisi Pemilihan Umum,”(Universitas Muslim Indonesia 2023) 4:1 (April 2023): 104-120.

satu komponen penting yang harus mendapat perhatian serius adalah tingkat partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam menggunakan hak pilihnya karena semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka kualitas pemilu akan semakin baik dan sebaliknya jika tingkat partisipasi masyarakat rendah maka hasil pemilu bisa dikatakan kurang mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu dibentuknya Relawan Demokrasi oleh Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum.<sup>20</sup>

*Kesepuluh*, Skripsi yang ditulis oleh Faharudin mahasiswa universitas Dayanu Ikhsanuddin (2021) yang berjudul “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Serentak Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Panitia Pemilihan Umum Daerah Kota Baubau dalam penetapan daftar pemilih tetap pada pemilu serentak 2019, serta menelusuri faktor-faktor yang menghambat dalam penetapan daftar pemilih tetap pada pemilu serentak tahun 2020. Penelitian dilakukan di kantor KPUD dengan menggunakan metode data primer dan sekunder.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Peran KPUD Kota Baubau dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya pemutakhiran, penyusunan dan penetapan DPT dimana prosesnya cukup panjang dan kegugupan antara satu proses dengan lainnya, diawali dengan membandingkan daftar pemilih tetap dengan DP4 setelah disinkronkan oleh KPU, yang kemudian dilakukan pemutakhiran data pemilih (dicocokkan dan diteliti) kemudian disusun dan dimutakhirkan oleh Daftar Pemilih Sementara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (PPS).

Daftar Pemilih Sementara (DPS), Setelah penetapan DPS berkat penyempurnaan pembuatan Daftar Pemilih Sementara Revisi (DPSHP), begitu pula DPSHP hingga akhirnya terbentuk DPSHP, dari DPSHP Final inilah

---

<sup>20</sup> Dri Sucipto.” Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partispasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Studi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Laut”,( Universitas Muhammadiyah Luwuk), 3:1 (Juni 2017): 10-35.

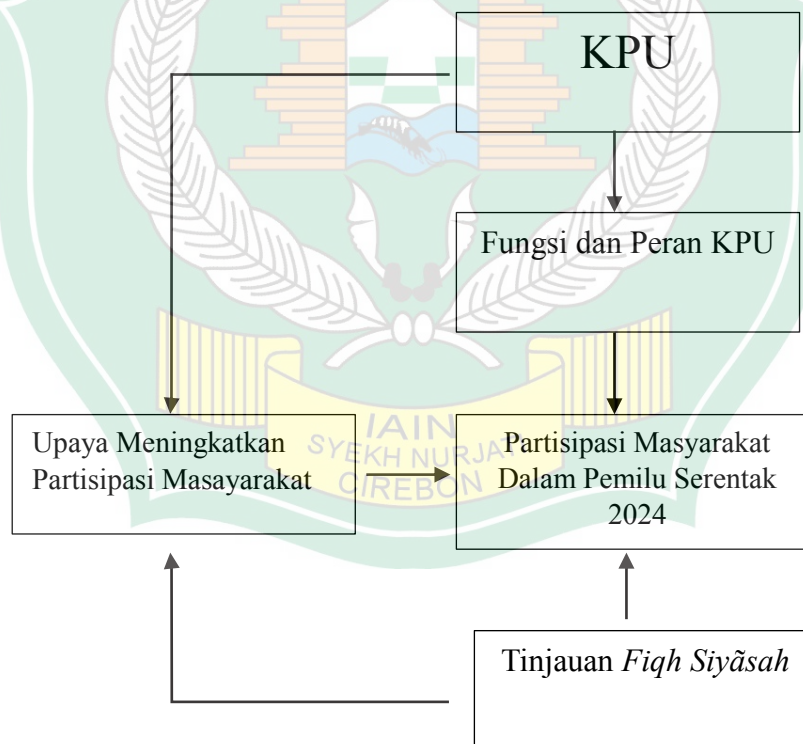


kemudian KPUD Kota Baubau menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).<sup>21</sup>

### E. Kerangka Teori

Menurut Sugianto Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>22</sup> Kerangka berfikir juga merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Ini dianalogikan oleh peneliti dalam melakukan penelitian berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dicapai, serta berfungsi sebagai peta konsep dalam penelitian. Visualitas kerangka berfikir tentang penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:<sup>23</sup>

**Tabel 1.1 Kerangka Berfikir**



<sup>21</sup> Faharudin, "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Serentak Tahun 2020". {*Skripsi*. Universitas Dayanu Ikhsanuddin 2021), 15.

<sup>22</sup> Sugianto. "Teori Kerangka Berfikir" ( Jakarta: Gramedia Pustaka 2020), 35.

<sup>23</sup> Aji, P, Pratama, S, Yahya, A. K. Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube. Sintesa, Studi Pustaka & Komunikasi, (Agustus 2023): 15–24.

Bagan kerangka berfikir diatas telah menunjukkan bagaimana alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali pemikiran dengan mencari tahu KPU Kota Bekasi, lalu mencari tahu fungsi dan peran KPU Kota Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum serentak tahun 2024, dan mencari tahu peran KPU Kota Bekasi di tinjau dari perspektif *fiqh Siyāsah*, Hasil akhir yang akan dicapai adalah mengetahui secara jelas strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum serentak tahun 2024.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.<sup>24</sup>

## **F. Metodologi**

1. Metode dan Pendekatan Penelitian
  - a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

---

<sup>24</sup> Pasal 10 Undang-undang No 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya.<sup>25</sup>Corbin dan Strauss menjabarkan bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, Sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, Gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.<sup>26</sup> Moleong mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci .Oleh karena itu itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Pada penelitian ini peneliti memiliki maksud untuk mengetahui secara langsung fakta di lapangan tentang Strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2024.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi bersama pihak. Fokus utama dalam penelitian empiris yaitu berupa informasi yang diperoleh dari pengalaman langsung berupa data.

Metode penelitian empiris juga merupakan sebuah penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti cara kerja hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian empiris diambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat, badan pemerintah dan badan hukum. Dipilihnya pendekatan ini sebagai salah satu pendekatan penulisan guna memperoleh data di lapangan dan Strategi KPU kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

#### c. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 341.

<sup>26</sup> Corbin dan Strauss. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Malang: Dinas Perpustakaan Umum 2020) ,120.

Untuk mengetahui bagaimana strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 maka di perlukan data yang akurat serta terpercaya. Penelitian ini menggunakan sumber data:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung atau melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, hasil observasi dan wawancara diambil langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.<sup>27</sup>

2) Sumber Data Sekunder

Data-data, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersebut berupa informasi mengenai penelitian yang sedang diteliti yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi maupun internet.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi salah satu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti, dengan pengamatan langsung dilokasi yang dijadikan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serentak tahun 2024.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

---

<sup>27</sup> Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2010), 35.

<sup>28</sup> Elina, Syarif dan Zulkarnain. *Pembelajaran Menulis*, Pusat Pengembangan dan Pendidikan Bahasa. (Jakarta:2009), 50.



(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi berupa pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel berupa buku, catatan, jurnal, surat kabar, makalah, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup>

2. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono Analisa data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini digunakan Teknik deskriptif kualitatif.<sup>31</sup>

Analisis deskriptif kualitatif ini diawali dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian, setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data dengan mengklasifikasikannya kemudian proses analisa dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan, yaitu;

- 1) reduksi data
- 2) penyajian data

<sup>29</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 117.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta,2010).Hlm.208

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 200.

3) penarikan kesimpulan.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami penelitian maka pembuatan sistematika ini di susun atas lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

**BAB Pertama Pendahuluan:** Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB Kedua Landasan Teori:** Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang meliputi grand theory yang akan menjadikan landasan ini berkaitan dengan penelitian yang meliputi, Strategi KPU Kota Bekasi dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum srentak 2024, Faktor pendukung dan pengahalang KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan peran KPU Kota Bekasi di tinjau dari perspektif fiqih *siyāsah*.

**BAB Ketiga Objek Kajian:** Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum KPU Kota Bekasi, Profil KPU Kota Bekasi, struktur organisasi, tugas dan wewenangnya.

**BAB Keempat Analisis Penelitian:** Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian yang di dapatkan peneliti.

**BAB Kelima Penutup:** Dalam Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian, serta saran-saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis. Pada bagian akhir skripsi akan disertakan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran data yang mendukung.

---

<sup>32</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014, 75.